

**EFEKTIVITAS PENDATAAN PROGRAM DANA
BANTUAN SOSIAL TUNAI (BST) PADA ERA PANDEMI
COVID-19 OLEH DINAS SOSIAL PROVINSI DKI JAKARTA**

VERU PARINTON
NPP.29.0615

*Asdaf Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta
Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah*

Email: veruparinton98@gmail.com

ABSTRACT (in english)

Problem/Background (GAP): *The Cash Social Assistance Fund Program is one of the DKI Jakarta Provincial government programs that was implemented during the Covid-19 pandemic era to improve community welfare. In its implementation, there are several related obstacles, such as the lack of public understanding of the acceptance process, population mobility and the data of recipients of the Cash Social Assistance Fund recipients are not yet valid and up-to-date. Objective:* *The purpose of this research is to find out whether the process is effective or ineffective. So this research was conducted to examine and understand the effectiveness of data collection on cash social assistance funds (BST) in the era of the covid-19 pandemic in DKI Jakarta Province. Methods:* *This study used a qualitative method with a descriptive method. Sources of data used are primary data sources and secondary data, data analysis techniques used are data reduction, data presentation and draw conclusions. Results/Findings:* *To ensure that this program is effective and on target, it is necessary to provide valid data and information for recipients of Cash Social Assistance. This can be done by conducting socialization, coordination, facilities and infrastructure with related agencies so that the program can run optimally. In addition, the Social Service can provide guidance on the importance of saving through a savings book to improve welfare and provide incentives to employees. Conclusion:* *In this study, it can be concluded that the Cash Social Assistance Program Phases one to six have been effective.*

Keywords: *Cash Social Assistance Fund, Effectiveness, DKI Jakarta Provincial Social Service*

ABSTRAK (in bahasa)

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Program Dana Bantuan Sosial Tunai adalah salah satu program pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diterapkan pada era pandemic Covid-19 berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat . Pada pelaksanaannya terdapat beberapa kendala terkait seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang proses penerimaan , mobilitas penduduk hingga data penerima penerima Dana Bantuan Sosial Tunai belum valid dan mutakhir. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah dalam prosesnya efektif atau tidak efektif . Sehingga Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan memahami Efektivitas pendataan program dana bantuan sosial tunai (BST) pada era pandemi covid-19 di Provinsi DKI Jakarta. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode deskriptif. Sumber data yang digunakan ialah sumber data primer dan data sekunder, teknik analisa data yang digunakan ialah reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Untuk memastikan program ini efektif dan tepat sasaran, maka perlu tersedianya data dan informasi yang valid bagi penerima Bantuan Sosial Tunai. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi, koordinasi, sarana dan prasarana dengan dinas terkait agar program dapat berjalan dengan optimal . selain itu Dinas social dapat memberikan pengarahan pentingnya menabung melalui buku tabungan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberikan intensif kepada pegawai . **Kesimpulan:** Pada penelitian, ini dapat disimpulkan bahwa program Bantuan Sosial Tunai Tahap satu sampai enam sudah efektif .

Kata kunci: Dana Bantuan Sosial Tunai , Efektivitas, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak awal tahun 2020 Indonesia telah mengalami bencana non- alam yakni adanya penyebaran virus *covid-19* Kasus terkonfirmasi *covid-19* nasional sebesar 4.181.309 kasus positif, 73.238 (1,8%) kasus aktif, 3.968.152 (94,9%) sembuh, 139.919 (3,3%) meninggal data tersebut diambil dari corona.jakarta.go.id terakhir update 16 september 2021. Hal ini diperkuat dengan keluarnya penetapan keputusan presiden No.12 Tahun 2020 tentang penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona virus Disease 2019* sebagai bencana nasional. Selain itu juga terdapat kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang membatasi kegiatan masyarakat sehingga berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat. Dengan diterapkannya kebijakan-kebijakan tersebut yang bertujuan untuk mengurangi penyebaran pandemi *covid-19* tentunya mengalami banyak sekali permasalahan baru yang berhubungan dengan sektor kesehatan, sektor ekonomi, sektor budaya dan sektor sosial yang membuat setiap kegiatan masyarakat terhambat bahkan terhenti.

Dampak akibat pandemi *covid-19* ini juga sangat terasa di kalangan warga DKI Jakarta pada sektor kesehatan dan yang terutama pada sektor perekonomian yang menyebabkan peningkatan angka pengangguran karena banyak pegawai yang di PHK dari tempat pekerjaannya. Akibat banyaknya kasus PHK pada masa pandemi *covid-19* tersebut maka angka pengangguran dan

kemiskinan mulai meningkat sehingga membuat masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam masa pandemi.

Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah terus berusaha dengan segala cara untuk memperkecil kasus penularan dan penyebaran pandemi *covid-19* dengan mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang *refocusing* kegiatan, relokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka mempercepat penanganan pandemi *covid-19*. Adapun sasaran dari *Refocusing* anggaran terbagi menjadi 3 sektor yaitu perekonomian, Kesehatan, dan jaring pengaman social. Salah satunya Pemprov DKI Jakarta yang juga mengeluarkan berbagai rencana bantuan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak pandemi *covid-19*. terdapat beraneka ragam program yang imajinatif dan inspiratif yang telah di persiapkan oleh pemerintah untuk memberikan jalan keluar dari persoalan dasar yang di hadapi oleh warga DKI Jakarta. masalah mendasar yang dialami warga DKI Jakarta adalah tentang kesejahteraan social semasa pandemic Covid-19 . Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk terus memberikan bantuan sosial melalui program-program yang telah di bentuk oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Melalui Dinas Sosial satu-satunya adalah Program Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi masyarakat Provinsi DKI Jakarta yang telah dilaksanakan dari Tahap 1 sampai Tahap 6 untuk membantu masyarakat menengah kebawah ditengah masa PPKM. Bantuan Sosial Tunai (BST) merupakan bantuan yang berbentuk uang dan dialokasikan kepada keluarga penerima manfaat atau keluarga yang tidak mampu secara ekonomi dan yang rentan terkena dampak akibat pandemmi *covid-19*. tujuan pemerintah itu sendiri membuat program rangkaian yang membantu selama pandemi *covid-19* adalah untuk tetap menaungi dan meringankan beban masyarakat terutama yang terdampak *pandemi covid-19* sebagai tanggung jawab dari pemerintah .

Untuk penerima bantuan sosial tunai di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2021 berjumlah 1.007.379 penerima bantuan sosial, adapun rincian tiap kota administrasinya seperti berikut, Kota Administrasi Jakarta Pusat 55.346, Kota Administrasi Jakarta Utara 210.344, Kota Administrasi Jakarta Barat 79.346, Kota Administrasi Jakarta Selatan 160.733, Kota Administrasi Jakarta Timur 497.490, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 4.120 penerima. Penerimaan dana Bantuan Sosial Tunai tersebut sudah maksimal mencapai 90,1% serta masih ada masyarakat yang beelum menerima sekitar 9,9 % karena masyarakat masih belum memahami proses penerimaannya dan juga masih terdapatnya NIK ganda pada data penerima Bantuan Sosial Tunai . Data diatas adalah jumlah bantuan sosial tunai yang telah tersalurkan atau terealisasikan dan data tersebut diambil dari website pemerintah daerah DKI Jakarta.

Program Bantuan Sosial Tunai (BST) tersebut diharapkan bisa menolong meringankan beban masyarakat Jakarta. Dilihat juga dari selainitu tujuan dari bantuan sosial ini untuk memacu dan memotivasi kesadaran, semangat dan menumbuhkan kemampuan untuk mengatasi masalah kemiskinan yang melanda agar masyarakat dapat ketentraman sosial dan hidup secara wajar .

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pada pelaksanaan pendataan penerima yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta nyatanya proses pendistribusian bantuan sosial tunai tersebut masih terbilang belum efektif karena masih terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan pendistribusian Bantuan sosial tunai (BST) tersebut, seperti masih kurangnya pemahaman masyarakat dalam proses penerimaan Bantuan Sosial Tunai (BST) terdapatnya Nomor Induk Kependudukan yang ganda yang berakibat kepada proses pendataan Bantuan sosial Tunai (BST) informasi ini didapatkan melalui situs media sosial dinas sosial Provinsi DKI Jakarta.

Pendataan penerima bansos masih belum valid dan mutakhir akibatnya bermunculan kasus error data dan ketidaksinkronan antara data pemerintah daerah dengan data RT. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DKTS) seharusnya diperbarui secara berkala oleh pemerintah kotakemudian diverifikasi dan divalidasi oleh pemerintah provinsi dan kementerian sosial. Sistem pendataan administrasi yang belum efektif ini, merupakan salah satu kendala yang didapati oleh data Dinas Sosial yang perlu diperbaharui dan di koordinasikan dengan perangkat daerah terkait. Pengelolaan data yang akurat dan tepat serta terverifikasi merupakan salah satu bentuk pendukung dalam lancarnya pelaksanaan bantuan sosial tunai.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak lepas dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah ditulis sebagai karya ilmiah guna bahan perbandingan sekaligus pedoman penulis. Penelitian sebelumnya akan menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Pertama, Penelitian Melati Zulkarnaini (2019) *berjudul* Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Pasir Pengairan. Yang menemukan bahwa Program BST belum berjalan efektif di kabupaten rokan hulu dapat dilihat disetiap indikator yaitu pada aspek ketepatan sasaran, aspek sosialisasi program, aspek tujuan program, aspek pemantauan program. Kedua, Penelitian Fathkul Khoiriyah, dkk (2020) *berjudul* Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial Dari Pemerintah Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Desa Gedongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. Hasil penelitian ini menjelaskan Dalam pelaksanaan Program BST di desa gedongarum masih dirasa kurang efektif, hal ini dikarenakan kurangnya inisiatif dari perangkat desa dalam penyaluran Bantuan Sosial Tunai.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan keadaan yang baharu serta informan yang lebih luas. GAP penelitian juga hanya ada dan merupakan masalah khusus yang terjadi di Lokasi Penulis yakni pada Provinsi DKI Jakarta.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui serta menganalisis efektivitas pendataan Program Bantuan Sosial Tunai (BST) yang dilakukan oleh dinas Sosial di Provinsi DKI Jakarta.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan induktif untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dialami subyek penelitian dari masalah yang terjadi (Sugiyono, 2018). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, observasi yang didapat dari sumber data primer dan sekunder dengan narasumber yang ditetapkan melalui *criteria based selection* yakni Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta (1 orang), Kabid Pengembangan Kesejahteraan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin (1 orang), Kasi Pengembangan Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (1 orang), Pusat Data Informasi Jaminan Sosial (1 orang) dan masyarakat penerima BST (5 orang). Analisis data menggunakan teori Sugiyono (2018:247) yang terdiri dari tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Efektivitas ini akan dikaji dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Emitai Etzioni dalam Indrawijaya (2010:187).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Efektivitas Dinas Sosial Dalam Pendataan Dana Bantuan Sosial Tunai di Provinsi DKI Jakarta

Peneliti menganalisis efektivitas pelayanan perizinan melalui aplikasi SiPeri di Kota Dumai dengan menggunakan teori efektivitas Emitai Etzioni dalam Indrawijaya (2010:187).. Yang memiliki dimensi antara lain Adaptasi, Integrasi, Motivasi Anggota dan Produksi.

A. Adaptasi

• Penyelenggaraan

Dalam melakukan penyelenggaraan program Dana Bantuan Sosial Tunai tentunya sudah berdasarkan standar operasional prosedur yang jelas dan memiliki tujuan atau sasaran yang hendak di capai . penyelenggaraan program Dana Bantuan Social Tunai ini terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 serta Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019.

Penyelenggaraan yang dilakukan oleh dinas social telah sesuai dengan standar operasional yang berlaku, selain itu juga dalam pendistribusiannya program tersebut dapat ter-realisis dalam kurun waktu lima belas hari . Pendistribusian Dana Bantuan Sosial Tunai dilakukan hampir setiap hari dengan jumlah yang telah ditentukan oleh Dinas Sosial dan Bank DKI , dapat dilihat di Jakarta timur pada tanggal 12 Januari dibagikannya 40.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan seterusnya , pendistribusian dilaksanakan dalam kurun waktu lima belas hari. Jakarta selatan pada tanggal 14

Januari dibagikannya 40.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan seterusnya, dalam kurun waktu sembilan hari. Jakarta Utara pada tanggal 18 Januari dibagikannya 40.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan seterusnya, dalam kurun waktu Sembilan hari. Jakarta Pusat pada tanggal 25 Januari dibagikannya 8.976 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan seterusnya, dalam kurun waktu tiga hari. Jakarta Barat pada tanggal 21 Januari dibagikannya 16.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan seterusnya, dalam kurun waktu enam hari dan Kepulauan Seribu hanya pada tanggal 20 Februari dibagikannya 5.022 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam kurun waktu satu

B. Integrasi

• Koordinasi

Pihak Dinas Sosial sendiri melakukan koordinasi dengan antar pihak, seperti Bank DKI, Dinas Dukcapil, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Kominfo Pusdatin Jamsos, Polres Tiap Kota Wilayah Administrasi serta Polisi Pamomng Praja. Koordinasi dilakukan sebagai percepatan pelaksanaan Program Bantuan Sosial Tunai dan kesuksesan Program Bantuan Sosial Tunai. Untuk memperkuat Koordinasi program Bantuan Sosial Tunai, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta membuat perencanaan koordinasi agar dapat berjalan secara efektif dan sesuai sasaran.

• Sosialisasi

Pelaksanaan dari suatu kegiatan tidak akan lepas dari yang namanya sosialisasi, baik sosialisasi yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Sosialisasi yang dilakukan biasanya bertahap dan berjenjang mengingat keadaan sedang dalam situasi pandemic *Covid-19* maka sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta terbatas.

Sosialisasi yang disampaikan oleh Dinas Sosial kepada masyarakat dilakukan menggunakan Media Sosial seperti Instagram, Facebook dan Twitter sedangkan untuk pemahaman langsung di lapangan itu dilaksanakan oleh unsur wilayah, seperti sosialisasi melalui kelurahan yang nantinya dapat disampaikan kepada RT atau RW yang terjun langsung dengan masyarakat maupun satuan pelaksana di kecamatan tiap-tiap wilayah atau pendamping sosial yang ada di wilayah tersebut.

C. Motivasi Anggota

• Sarana dan Prasarana

Dalam membuat program tentunya perlu disediakan sarana dan prasarana yang mendukung program tersebut. Sarana dan Prasarana merupakan hal utama sebagai penunjang kelancarannya kegiatan agar dapat berjalan dengan baik. Pada Dinas sosial Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan pendistribusian bantuan sosial tunai melakukan kolaborasi dengan dinas-dinas lain yang terkait. Yang disediakan oleh dinas yang terkait dengan pelaksanaan program Dana Bantuan Sosial Tunai untuk memudahkan para petugas dalam melakukan tugasnya, sedangkan untuk para pegawai dinas sendiri tidak mendapatkan sarana atau bonus yang dapat untuk mendukung motivasi kerjanya. Berdasarkan observasi dan wawancara yang peneliti lakukan, dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana yang ada di Dinas Social Provinsi DKI Jakarta semuanya dilakukan dengan berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait seperti berikut:

Tabel 1. Sarana dan Prasarana Melalui SKPD

No	Dinas	Sarana dan Prasarana
1	Bank DKI	Kartu dan Buku Tabungan BST
2	Dinas Kesehatan	Fasilitas Protokol Kesehatan (Handsanitizer , Masker dan Termometer Digital)
3	Dinas Komunikasi Informasi dan Teknologi	Disediakan Website Corona.Jakarta.go.id
4	Dinas Pendidikan	Gedung Sekolah
5	Pusdatin Jamsos	Monitor dan Laptop
6	Polres dan Pol PP	Untuk Mentertibkan dan Mengamankan dilapangan

D. Produksi

• Intensitas Kegiatan

Dalam mengukur efektif atau tidaknya pendataan dan pendistribusian dana bantuan social tunai jumlah yang terdata harus sesuai dengan jumlah dilapangan , selain itu apakah Dana Bantuan Sosial Tunai tersebut sudah Tepat Sasaran atau belum. Dana Bantuan Sosial Tunai Tahap 1 diatur dalam SK Gub Nomor 20 Tahun 2021 tentang penerima BST bagi masyarakat terdampak *Covid- 19* . Kemudian untuk tahap 2 dan 3 diatur dalam SK Gub Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 20 Tahun 2021 Terjadi perubahan lagi pada tahap ke 4 sebagaimana dimaksud dalam SKGub Nomor 570 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Nomor 20 Tahun 2021 . untuk tahap ke 5 dan ke 6 diatur dalam SK Gub Nomor 898 Tahun 2021 tentang penerima BST bagi masyarakat terdampak *Covid-19* .

Masyarakat penerima dana bantuan sosial tunai berbeda tiap bulannya dikarenakan data tersebut selalu diperbarui dan di validasi , selain itu penerima dana bantuan social tunai juga sudah mencapai sasaran yaitu 90% itu membuktikan bahwa intensitas kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta sudah dikatakan efektif.

3.2. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan program pendataan bantuan sosial tunai (BST) pada provinsi DKI Jakarta yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta ditemukan efektif. Hal tersebut dikupas dengan beberapa indikator seperti penyelegaraan, koordinasi, sosialisasi, sarana dan prasarana serta intensitas kegiatan. Sama halnya dengan penelitian Melati Zulkarnaini (2019) bahwa Program BST belum berjalan efektif di kabupaten rokan hulu dapat dilihat disetiap indikator yaitu pada aspek ketepatan sasaran , aspek sosialisasi program , aspek tujuan program , aspek pemantauan program (Zulkarnaini, 2020).

Dalam program pendataan bantuan sosial tunai (BST) pada provinsi DKI Jakarta yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dapat berjalan efektif. Hal tersebut dikarenakan

terdapat kolaborasi yang baik antar SKPD dan pihak yang berwenang dalam rangka mensukseskan program BST sebagai bentuk bantuan pemerintah kepada masyarakat terdampak *covid-19*. Berbeda dengan temuan Fatkhul Khoiriyah, dkk (2020) dimana Dalam pelaksanaan Program BST di desa gedongarum masih dirasa kurang efektif, hal ini dikarenakan kurangnya inisiatif dari perangkat desa dalam penyaluran Bantuan Sosial Tunai (Khoiriyah, et al, 2020).

IV. KESIMPULAN

Penulis Menyimpulkan bahwa penyelenggaraan pendataan BST oleh Dinas Sosial telah berjalan dengan efektif. Yang dibuktikan dari berhasilnya realisasi pembagian sesuai SOP dalam kurun waktu 15 hari atau kurang dari satu bulan. Didukung dengan kualitas SDM yang memadai, koordinasi yang baik antar SKPD, sosialisai yang rutin dilaksanakan, sarana prasarana yang mendukung dan memadai.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada wilayah-wilayah yang mudah ditempuh.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Bantuan Sosial tunai (BST) pada masa pandemi *covid-19* di Provinsi DKI Jakarta untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, seluruh dosen pengajar, pembimbing dan penguji juga seluruh pihak yang terlibat dalam penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, W. N. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Edi, S. (2007). *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Emitai Etzioini dalam Indrawijaya., A. I. (2010). *Teori Perilaku dan Budaya Organisasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Khoiriyah F, O. L. (2020). *Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial Dari Pemerintah Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Desa Gedongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro*
- Melati M, Z. H. (2021). *Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Pasir Pengaraian*.
- Soetomo. (2010). *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Steers, R. M. (1985). *Efektivitas Organisasi Kaidah Peri Laku (Alih Bahasa Magdalena)*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.